

Pemusnahan Amunisi TNI

Dari Halaman 1

(TNI), akan adanya pemusnahan amunisi. Lokasi yang berada di sekitar pantai selatan itu biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi yang tidak terpakai atau kedaluwarsa. Dia menilai banyaknya warga yang menjadi

Diduga Ada Kelalaian SOP

Dari Halaman 1

investigasi mendalam terkait peristiwa ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak milik TNI di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/6). Direktur Imparsial Ardi Manto menilai jatuhnya korban jiwa dalam proses pemusnahan amunisi itu adalah bentuk inkompetensi penataan wilayah pertahanan termasuk proses perencanaan dan pengendalian wilayah pertahanan. "Diperlukan adanya investigasi mendalam tentang jatuhnya korban yang bukan hanya dari kalangan prajurit. Sebab, hal ini menjadi sinyal kuat adanya kelalaian dalam pelaksanaan SOP disposal amunisi tersebut," kata Ardi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6). Menurutny, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan tidak hanya menysar pelaksana teknis, tetapi juga menyentuh atasan yang bertanggung jawab.

Daftar Amunisi yang Meledak

Dari Halaman 1

gai jenis amunisi yang meledak saat pemusnahan di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. "Sementara yang kami terima, yang saya dapat informasi bahwa ini kan bermacam munisi," kata Kristomei dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Senin (12/5). "Ada MKK, MKB, munisi kaliber besar, munisi kaliber kecil. Contohnya misalnya munisi pistol, munisi S1, kaliber 5.56, 7.62. Ada juga misalnya granat, granat tangan, munisi atau mortir dan sebagainya," ujarnya menambahkan. Kristomei tak merinci jumlah total amunisi yang meledak saat hendak dimusnahkan tersebut. Ia hanya menyebut setiap amunisi memiliki masa kedaluwarsa. "Apabila selama tidak dipakai dan sudah melebihi masa pakainya, kedaluwarsa yang memang itu sebaiknya harus segera dimusnahkan. Sehingga nanti tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan karena terlalu lama disimpan di gudang," katanya. Jenderal bintang dua itu memastikan bahwa amunisi yang sudah kedaluwarsa wajib dimusnahkan. Pihaknya sudah rutin melakukan pemusnahan di daerah Garut.

Risiko Simbolis dan Politis Pembentukan Satgas

Dari Halaman 1

yak Ormas punya kedekatan dengan kekuasaan; penanganannya bisa rawan konflik. 2. Potensi Abuse of Power: Tanpa kontrol, dapat menjadi alat represi terhadap Ormas yang kritis. 3. Stigma Sosial: Menggeneralisasi Ormas sebagai bagian dari premanisme dapat memicu resistensi. Pembentukan Satgas Terpadu ini berpotensi efektif menekan aksi premanisme jika: 1. Dilengkapi regulasi yang kuat, kewenan-

Peradi Bersatu Penuhi Panggilan Polisi.....

Dari Halaman 1

ing penting ini ada unsur yang mengungkap data pribadi orang,” jelas Ade. Pemeriksaan hari ini melibatkan pelapor, Wakil Ketua Peradi Bersatu Lechumanan, serta empat orang saksi pelapor, termasuk Ketua Umum Peradi Bersatu, Zevrijn Boy Kanu, dan Ade Darmawan. Kelima saksi tiba di Polres Jakarta Selatan sekitar pukul 11.10 WIB. Ade Darmawan mengatakan telah membawa 16 barang bukti untuk

Libya Memanas, Tripoli Dikepung Senjata

Dari Halaman 1

hitam di tengah suara tembakan. Ada juga gambaran orang-orang bersenjata di jalan yang konvoi memasuki kota. Tembakan dan bentrokan kemudian melanda beberapa wilayah di Tripoli.

Kebanggaan Keluarga

Dari Halaman 1

punya iman sehingga menyerahkannya semua pada Tuhan. "Tapi untungnya kita masih bisa besar iman, sehingga apapun yang terjadi yang diberikan dan itu yang diambil dari beliau yang di atas," imbuhnya. Hermawan adalah anak ke-4 dari Sugiarto dan istrinya, Bernadeta Rusminiwati. Terakhir sang ayah bertemu dengan putranya tersebut adalah saat Hari Raya Natal tahun lalu. Libur lebaran terakhir, Hermawan tak mudik ke Sleman dan menghabiskan waktu di tempat mertuanya, Jakarta. "Pokoknya biasanya setiap Natal dia pasti menyempatkan pulang dan itu biasanya kalau dia

korban itu diduga karena tengah memburu sisa selongsong amunisi. "Terkait teknis jadinya bagaimana saya tidak tahu. Tapi yang jelas di Kampung Cijeruk itu sudah biasa dilakukan pemusnahan. Warga sudah pada tahu, bahkan kalau ada rumah warga yang rusak akibat pemusnahan, biasanya ada penggantian," ujar Faizal.

Ia menyoroti soal SOP dalam pengamanan area serta pemberian informasi kepada warga sekitar lokasi. Menurutny, keberadaan warga sipil yang berada dalam jarak bahaya menunjukkan lemahnya pengamanan dari pihak TNI dan kurangnya sosialisasi kepada warga tentang jarak dan batas aman lokasi disposal. Ia berkata seharusnya dilakukan pengamanan berlapis mengingat efek ledakan yang akan timbul cukup mematikan. "Padahal pemusnahan bahan peledak, termasuk amunisi kadaluwarsa milik TNI memerhatikan aspek keamanan, keterbukaan informasi dan keterlibatan serta kerja sama dengan masyarakat sekitar lokasi pemusnahan amunisi," ujarnya. Lebih jauh, Imparsial menilai peristiwa jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa itu menunjukkan adanya gejala masalah yang lebih besar, yakni ketidak-profesionalan TNI akibat terlampau jauh ditarik dalam urusan-urusan non-pertahanan. Ardi mengatakan, keterlibatan TNI dalam wilayah sipil seperti penanganan kenakalan

"Nah munisi-munisi yang sudah tidak dipakai ini, yang sudah ada di gudang kami, boleh ditaruh di sana untuk dimusnahkan atau diledakan. Karena kalau tidak segera dimusnahkan justru akan membahayakan," ujarnya. Sementara itu Kepala Penerangan Kodam III/ Siliwangi Kolonel Inf Mahmuddin mengatakan pemusnahan amunisi berbagai jenis itu sudah sesuai dengan prosuder yang berlaku. "Selanjutnya tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam dua lubang sumur yang disiapkan, setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk pemasangan pengamanan," kata Mahmuddin. Mahmuddin menyebut setelah dinyatakan aman petugas pun melakukan peledakan di dua sumur yang dipenuhi amunisi kedaluwarsa tersebut untuk dihancurkan. Setelah pemusnahan di dua lubang selesai, kata Mahmuddin, pasukan TNI lalu menyiapkan pemusnahan di lubang ketiga. "Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia," katanya. Mahmuddin menuturkan, untuk penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI AD.

gan, tugas, dan batasan tindakan Satgas harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan. 2. Pendekatannya profesional, lintas sektor, dan berbasis data. Mitigasi wilayah rawan premanisme dan ormas yang menyimpan menggunakan data intelijen yang akurat. Selain itu, gunakan pendekatan berbasis data untuk menetapkan prioritas tindakan. 3. Seimbang antara tindakan represif dan pendekatan preventif/reformatif. Tidak cukup hanya menindak tanpa solusi, semisal alternatif pekerjaan, pelatihan, dan pembinaan kepada individu yang sebelumnya terlibat dalam preman-

diserahkan kepada kepolisian. “Kemudian, hari ini kami akan berikan beberapa bukti-bukti ya. Sekitar 16, nanti kami lihat. Terus ada sembilan video juga,” ungap Ade. Jumlah video ini bertambah tiga dari yang sebelumnya disiapkan untuk pemeriksaan yang dijadwalkan pekan lalu. Pemeriksaan terhadap saksi pelapor sebelumnya direncanakan pada Rabu (7/5/2025), namun ditunda karena Lechumanan berhalangan hadir. Pelaporan yang dilakukan oleh Peradi Bersatu ini bersifat delik murni, yang berarti tidak dilaku-

Al-Kikli sendiri merupakan salah satu pemimpin milisi paling berpengaruh di Tripoli. Baru-baru ini, ia terlibat dalam pertikaian dengan kelompok bersenjata. Reporter Al Jazeera Malik Traina dari Misrata melaporkan, setidaknya enam orang terluka. "Masyarakat marah karena setiap kali kelompok bersenjata ini bntrok, warga sipil yang menjadi

pulang walaupun dia sudah pangkat begitu dia masih tetap bermanja-manja sama mamanya," kata Sugiarto berkaca-kaca. "Ya begitulah anak saya. Semua akrab," timpal Rusminiwati. Berdasarkan pantauan, sejumlah karangan buka ungkapan duka cita memenuhi kediaman Kolonel Antonius Hermawan di Sleman. Karangan bunga datang dari berbagai institusi dan tentunya petinggi TNI, seperti Panglima TNI Jenderal Agus Sbiyunto hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sejumlah pelayat juga mulai berdatangan, sementara tak sedikit personel TNI berseragam lengkap yang terlihat di sekitar rumah duka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keluarga

Humas Rumah Sakit Nurhayati, Yusep Mulyana, menyatakan bahwa korban terdiri dari 9 orang warga sipil dan 4 orang dari aparat keamanan. "Kami hanya diperbantukan, semua korban dibawa ke rumah sakit Pameungpeuk," ujarnya. Berdasarkan foto yang diterima, kondisi korban ledakan amunisi ini cukup mengenaskan. Luka parah di bagian perut dan kaki.(tem/js)

siswa, program Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, hingga menjadi penjaga gedung kejaksaan sesungguhnya meningkatkan potensi kelalaian pada tugas utamanya. "Kecenderungan menarik TNI untuk terlibat dalam urusan-urusan sipil adalah ancaman serius bagi profesionalisme TNI yang mengakibatkan TNI menjadi lalai dan menggerus keahlian TNI dalam tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara," katanya. Ia pun meminta pemerintah untuk menanggung segala kerugian yang timbul akibat peristiwa itu, termasuk bagi keberlangsungan kehidupan keluarga korban yang meninggal dunia "Panglima TNI untuk mengevaluasi jajaran termasuk melakukan investigasi terhadap pimpinan pelaksanaan operasi atau komandan yang bertanggung jawab," ucapnya. Sebelumnya, ledakan terjadi saat pemusnahan amunisi tidak layak milik TNI di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa itu menyebabkan 13 orang meninggal dunia, terdiri dari empat Anggota TNI dan sembilan warga sipil.(cnni/js)

"Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyidikan atau Investigasi yang dilaksanakan," ujarnya. Semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pameungpeuk untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Daftar empat anggota TNI meninggal dunia: 1. Kepala Gudang Pusat Munisi III Pusat Peralatan TNI AD Kolonel Cpl Antonius Hermawan 2. Kepala Seksi Administrasi pergudangan gudang Pusat Munisi III Pusat Peralatan TNI AD Mayor Cpl Anda Rohanda dan 3. Koptu Eri anggota Gudpusmu III Puspalad 4. Pratu Aprio. anggota Gudpusmu III Puspalad Daftar sembilan warga sipil meninggal dunia: 1. Agus bin Kasmin. 2. Ivan, 3. Anwar bin Iman 4. Iyus Ibing 5. Dadang 6. Rizal 7. Rustiawan 8. Endang 9. Toto (cnni/js)

isme. Pebatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM untuk mengajak pelaku keluar dari lingkaran kekerasan dan kriminalitas. 4.Pendekatan Hukum dan Penegakan Secara Tegas tanpa diskriminasi. Benar ungkapan, “Negara tidak boleh didikte, kalah, dan tunduk kepada siapa pun, apalagi sama para preman berkedok ormas!” Tindak tegas setiap aksi premanisme dan pelanggaran hukum oleh Ormas, termasuk pemerasan, pungli, intimidasi, dan kekerasan. Termasuk pula menggunakan instrumen hukum pidana, perdata, dan administrasi, termasuk pembekuan Ormas yang melanggar UU Ormas.(*)

kan langsung oleh korban. Dalam hal ini, pelapor adalah Lembaga Berbadan Hukum (LBH). Terkait tuduhan yang dilaayangkan kepada Jokowi, Peradi Bersatu melalui ketua umumnya, Zevrijn, berencana untuk berkoordinasi lebih lanjut dengannya sebagai korban. “Rencananya kami akan berkunjung kepada korban. Kami akan langsung ke Kota Solo nanti,” kata Ketua Umum Peradi Bersatu, Zevrijn Boy Kanu. Ade menambahkan, komunikasi di antara Peradi Bersatu dengan Jokowi sudah terjalin dan pertemuan akan diatur dalam waktu dekat. (kps/js)

korban," ujar Traina. "Ketika kelompok-kelompok ini berkelahi dan orang-orang terbunuh, tidak ada yang bertanggung jawab. Warga setempat menginginkan keadilan dan berharap pihak berwenang meminta pertanggungjawaban mereka yang berada di balik kekerasan tersebut," tambah dia. (cnni/js)

rencananya menggelar misa requiem terlebih dahulu sebelum jenazah Hermawan dikebumikan. Sesuai jadwal, pemakaman berlangsung pukul 16.00 WIB nanti sore di makam Sasonoloyo Kaliwanglu, Harjobinangun, Paken, Sleman. Total ada empat anggota TNI yang tewas dalam kejadian ini. Sembilan korban tewas lainnya berasal dari warga sipil. Selain Hermawan, tiga korban lain adalah Mayor Cpl Anda Rohanda, Kopral Dua (Kopda) Eri Priambodo dan Prajurit Satu (Pratu) April Setiawan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana, mengatakan Kolonel Antonius Hermawan disemayamkan di Bekasi sebelum dibawa ke kampung halamannya di Yogyakarta.(cnni/js)

MA Tolak PK Johnny

Dari Halaman 1

Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020-2022. "Tolak," demikian petikan amar putusan PK Perkara Nomor 919 PK/PID.SUS/2025 yang dikutip Antara, Selasa (13/5). Putusan PK tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Surya Jaya bersama dua anggotanya, Agustinus Purnomo Hadi dan Sutarjo, pada hari Jumat (9/5). Dengan adanya putusan PK ini, hukuman terhadap Johnny Plate sama dengan vonis di tingkat kasasi. Sebelumnya, MA pada hari Selasa (9 Juli 2024) telah menolak permohonan kasasi mantan Menkomfino tersebut. Berdasarkan putusan kasasi Perkara Nomor 3448 K/ Pid.Sus/2024, MK menyatakan menolak kasasi Johnny Plate dengan perbaikan pada barang bukti berupa satu unit mobil mewah yang dirampas untuk negara. "Perbaikan sekadar barang bukti berupa satu mobil Land Rover nomor B-10-HAN dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian petikan putusan kasasi dimaksud. Sebelumnya, Johnny Plate divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan 6 bulan, sebagaimana putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI. Putusan banding yang diucapkan pada hari Senin (12 Februari 2024) itu menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8 November 2023). Selain menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim banding juga mengubah besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Johnny Plate, yakni dari Rp15,5 miliar subsider penjara 2 tahun menjadi Rp16,1 miliar dan 10.000 dolar AS subsider penjara 5 tahun. Dalam perkara ini, Johnny Plate bersama terdakwa lainnya dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp8,032 triliun. Johnny Plate dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ant/js)



Tabayyanu di Era Digital

Dari Halaman 1

memastikan kebenaran sebelum menyebarkan informasi, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6: "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti..." (QS. Al-Hujurat: 6). Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak langsung mempercayai informasi tanpa verifikasi, terutama jika datang dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Pentingnya tabayyanu di era digital semakin terasa ketika melihat bagaimana informasi palsu atau hoaks dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak serius. Dalam konteks sosial, hoaks dapat memecah belah masyarakat, memperburuk polarisasi politik, dan bahkan memicu kekerasan. Dalam konteks kesehatan, misinformasi tentang vaksin atau pandemi, misalnya, bisa berakibat fatal. Ketika informasi yang salah menjadi dasar pengambilan keputusan, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Salah satu contoh nyata adalah kasus hoaks yang menyebar di media sosial pada masa pandemi COVID-19. Banyak informasi palsu tentang khasiat obat tertentu atau teori konspirasi tentang asal-usul virus yang menyebar tanpa filter. Ini tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga mengganggu upaya penanganan pandemi secara global. Dalam situasi seperti ini, tabayyanu bukan hanya soal menjaga reputasi, tetapi juga menyelamatkan nyawa. Di Indonesia, dampak hoaks juga terasa dalam konteks politik. Pemilu, misalnya, sering menjadi momen di mana informasi palsu menyebar dengan masif, baik untuk mendiskreditkan kandidat tertentu atau untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara. Tanpa tabayyanu, demokrasi kita terancam oleh manipulasi informasi yang dapat merusak integritas proses politik. Namun, tabayyanu bukan sekadar upaya teknis untuk memverifikasi fakta. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kehormatan individu, kelompok, dan bangsa. Dengan memastikan kebenaran sebelum berbicara atau berbagi informasi, kita melindungi diri dari dosa fitnah dan ghibah, yang sangat dilarang dalam Islam. Untuk menerapkan tabayyanu di era digital, diperlukan kombinasi literasi digital, kesadaran kritis, dan etika berinternet. Literasi digital melibatkan kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi yang diterima. Ini termasuk keterampilan untuk memeriksa sumber, mengevaluasi kredibilitas berita, dan memahami konteks sebelum mengambil kesimpulan. Selain itu, perlu juga dikembangkan budaya klifikasi dalam komunitas digital kita. Misalnya, sebelum membagikan sebuah berita di grup WhatsApp keluarga atau media sosial, alangkah baiknya jika kita meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa kebenarannya. Apakah sumbernya terpercaya? Apakah ada bukti pendukung yang kuat? Apakah informasi tersebut berpotensi merugikan orang lain jika ternyata salah? Tabayyanu juga harus menjadi bagian dari pendidikan digital yang diajarkan di sekolah dan universitas. Generasi muda perlu dibekali keterampilan untuk menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga pembentuk opini yang kritis dan beretika. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa tabayyanu bukan hanya soal menjaga kebenaran, tetapi juga soal menjaga kepercayaan. Di dunia yang semakin terhubung ini, kepercayaan adalah modal sosial yang sangat berharga. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan karena seringnya terpapar informasi palsu, maka struktur sosial kita bisa runtuh. Oleh karena itu, mari kita jadikan tabayyanu sebagai prinsip dasar dalam setiap interaksi digital kita, demi masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berwawasan luas.

Seperti kata pepatah, "lebih baik berhati-hati daripada menyesal." Tabayyanu adalah cara kita berhati-hati dalam dunia yang penuh dengan informasi. Dengan menjadikan tabayyanu sebagai kebiasaan, kita bukan hanya melindungi diri dari kesalahan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan.